

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Identifikasi Masalah..... 8

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 9

1.3.1. Maksud Penelitian 9

1.3.2. Tujuan Penelitian 10

1.4. Kegunaan Penelitian 11

1.4.1. Kegunaan Teoritis 11

1.4.2. Kegunaan Praktis 11

1.5. Kerangka Pemikiran 12

1.6. Metode Penelitian 18

1.7. Lokasi Penelitian..... 20

1.8. Sistematika Penulisan 20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 24

2.1. Penegakan Hukum 24

2.1.1. Pengertian Penegakkan Hukum 24

2.1.2. Fungsi Penegakan Hukum	26
2.1.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum	28
2.2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perikanan	30
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana	30
2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	32
2.2.3. Tindak Pidana Di Bidang Perikanan	33
2.2.4. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perikanan	35
2.2.5. Penangkapan <i>Baby Lobster</i> Sebagai Tindak Pidana	37
2.3. <i>Baby Lobster</i>	39
2.3.1. Pengertian <i>Baby Lobster</i> (Benih-Benih Lobster), Nilai Ekonomi Dan Dampak Ekologis.....	39
2.3.2. Ketentuan Pelanggaran Penangkapan <i>Baby Lobster</i>	41
2.3.3. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku <i>Baby Lobster</i>	43
2.3.4. Proses Penegakan Hukum di Bidang Perikanan	44
2.4. Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Tindak Pidana Penangkapan <i>Baby Lobster</i> Illegal	47
2.4.1. Kedudukan, Fungsi Kepolisian, Dan Penegakkan Tugas Pokok	47
2.4.2. Kewenangan Kepolisian Dalam Tindak Pidana Perikanan	49

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian	51
3.1.1. Gambaran Umum Kepolisian Resor Pangandaran	51

3.1.2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan <i>Baby Lobster</i> Ilegal Dihubungkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/6/X/2025/SPKT/Satreskrim/ Polres Pangandaran/Polda Jawa Barat)	70
3.1.3. Kendala-Kendala Penyidik Dalam Menangani Kasus Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan <i>Baby Lobster</i> Ilegal Dihubungkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/6/X/2025/SPKT/Satreskrim/ Polres Pangandaran/Polda Jawa Barat)	76
3.1.4. Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan <i>Baby Lobster</i> Ilegal Dihubungkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/6/X/2025/SPKT/Satreskrim/ Polres Pangandaran/Polda Jawa Barat)	80
3.2. Pembahasan	83
3.2.1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan <i>Baby Lobster</i> Ilegal Dihubungkan Pasal	

88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/6/X/2025/SPKT/Satreskrim/ Polres Pangandaran/Polda Jawa Barat)	83
3.2.2. Kendala-Kendala Penyidik Dalam Menangani Kasus Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan <i>Baby Lobster</i> Ilegal Dihubungkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/6/X/2025/SPKT/Satreskrim/ Polres Pangandaran/Polda Jawa Barat)	91
3.2.3. Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan <i>Baby Lobster</i> Ilegal Dihubungkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/6/X/2025/SPKT/Satreskrim/ Polres Pangandaran/Polda Jawa Barat)	94

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan	100
4.2. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP